

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Tarakan

Jalan P. Diponegoro No.46 77114 08115410481

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tarakan/id/>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara / Kantor

Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)

Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Tarakan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
2. Copy Surat Keputusan (SK) Pindah/Pensiun
3. Surat Permintaan Penonaktifan Site Bank Supplier

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Satuan Kerja mengajukan SKPP beserta dokumen pendukung dari Satker (termasuk Surat Permintaan Penonaktifan Site Bank Supplier dari Satker) melalui aplikasi GPP/BPP/DPP satker
2. Petugas KPPN akan memeriksa kelengkapan dokumen. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan, maka dokumen akan dikembalikan melalui aplikasi
3. Apabila berkas sudah benar, petugas KPPN akan meneruskan persetujuan dokumen ke Kepala Seksi PDMS untuk dilakukan approve
4. Setelah dilakukan approve, satuan kerja dapat langsung mengunduh berkas SKPP yang telah ditandatangani secara elektronik di aplikasi dan meneruskannya ke satker baru atau ke PT Taspen/ASABRI sesuai peruntukannya

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Satu hari kerjaSejak SKPP telah diterima lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan SKPP

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Tarakan

Jalan P. Diponegoro No.46 77114 08115410481

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tarakan/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara / Kantor

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Tarakan

Pengaduan atas layanan tersebut dapat disampaikan melalui tatap muka secara langsung ke KPPN Tarakan, melalui email ke : kppn048tarakan@gmail.com, website <https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id/>, nomor telepon dan sms ke 08115410481, serta kotak layanan pengaduan.